



DPRD SIAP JEMBATANI KEPASTIAN RELOKASI PKL Malioboro Berharap Ada Penundaan

YOGYA (KR) - Para pedagang kaki lima (PKL) Malioboro berharap ada penundaan rencana relokasi atau penataan yang hendak dilakukan pemerintah. Aspirasi tersebut disampaikan dengan mendatangi gedung dewan dan kompleks balaikota.

Menurut Ketua Asosiasi PKL Yogya Wawan Suhendra, mengungkapkan pihaknya sama sekali tidak menolak adanya relokasi melainkan berharap ada penundaan sampai kondisi ekonomi lebih baik.

"Banyak rekan-rekan terganggu ekonominya. Apalagi pandemi selama dua tahun kemarin. Kalau langsung pindah, masih perlu adaptasi dan tidak langsung bisa laku," urainya usai audiensi di gedung DPRD Kota Yogya, Senin (17/1).

Sesuai rencana, proses penataan atau pemindahan PKL Malioboro menuju eks Bioskop Indra atau eks Dinas Pariwisata DIY akan dilakukan pada 1-7 Februari 2022.

Wawan menyebut sosialisasi baru dilakukan pada November 2021 lalu. Sehingga waktu untuk melakukan persiapan cukup mendesak. PKL pun mengusulkan agar relokasi ditunda dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun ke depan. Usai menyampaikan aspirasi di gedung dewan, ratusan PKL Malioboro juga mendatangi Pemkot Yogya guna menyampaikan aspirasi yang sama.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko, mengaku siap menjembatani kepastian relokasi bagi PKL Malioboro. Pihaknya bahkan telah membentuk panitia khusus (pansus) terkait pengawasan relokasi PKL. Kepanitiaan tersebut menjadi satu dengan pansus audit perijinan gedung yang ditetapkan kemarin. "Selaku pimpinan di dewan saya perintahkan anggota pansus untuk segera menjadi mediator komunikasi antara pedagang dengan pemkot dalam hal ini kepala daerah termasuk unit teknisnya. Supaya

nanti ada kepastian," jelasnya.

Menurutnya, penataan Malioboro memang harus memberikan dampak yang lebih baik. Akan tetapi jangan sampai muncul informasi yang simpang siur sehingga menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu pihaknya perlu menjembatani komunikasi supaya penataannya kelak membuahkan hasil positif bagi semua pihak.

Sedangkan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogya Kris Sarjono Sutejo yang menerima audiensi PKL Malioboro di kompleks balaikota mengatakan penataan itu salah satunya untuk menguatkan status aktivitas ekonomi pelaku PKL. Sebelumnya dengan menempati selasar Malioboro yang merupakan bagian kepemilikan pemilik toko bisa dikatakan keberadaan mereka informal. "Dengan adanya mereka menempati tempat yang disediakan tersebut mereka kemudian menjalankan aktivitas ekonominya dalam status formal," jelasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005